

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MAHAR
SUAMI MENINGGAL *QABLA AL-DUKHUL***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar sarjana hukum islam**



Disusun Oleh

Ubaidillah. A
Nim: 10821004763

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2011

ABSTRAK

Dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tata cara yang telah diatur oleh agama, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia. Persoalan perkawinan merupakan hal yang selalu patut untuk dibicarakan, karena hal ini menyangkut dengan fitrah manusia yang selalu menjadi kebutuhan dalam hidup ini.

Salah satu persoalan yang perlu menjadi sorotan sekaligus perhatian dikalangan ummat Islam adalah masalah mahar, terutama dalam situasi suami yang tidak menentukan mahar dan meninggal *qabla al-dukhul*. Lebih lanjut tentang mahar *qabla al-dukhul* ini, ternyata terjadi perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha'*. Hal ini jelas dengan terpecahnya mereka kepada dua kubu. Kubu pertama mengatakan bahwa mahar yang tidak ditentukan dalam akad nikah dan suami meninggal *qabla al-dukhul* adalah hukum nya wajib, sehingga mahar itu harus ditunaikan oleh keluarga dari pihak suami. Pendapat ini adalah dianut oleh *jumhur fuqaha'*, seperti: Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Daud, juga termasuk komentar Imam Syafi'e dalam salah satu pendapatnya. Sedangkan kubu yang lain mengatakan tidak wajib. Pendapat terakhir ini adalah berasal dari Imam *darul hijrah*, yaitu Imam Malik ibn Anas.

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan *Jumhur fuqaha'* merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Ini memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir apa sesungguhnya yang menyebabkan para *fuqaha'* tersebut berbeda pendapat. Disamping itu, untuk menyempurnakan penelitian ini penyusun mencoba menemukan landasan pemikiran Imam Malik dan metode yang digunakannya dalam mengistinbathkan hukum terhadap mahar suami meninggal *qabla al-dukhul* ini.

Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan metode analisis deduktif, analisis induktif, dan analisis isi (*content analysis*). Penulis menggunakan kitab *al-Muwatta'* juz 2, karangan Imam Malik sebagai sumber primer.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan mayoritas *fuqaha'* adalah adanya *mu'aradhah* (pertentangan) *qiyas* dengan *atsar*, karena Imam Malik meng*qiyaskan* mahar kepada harga pada jual beli. Disamping itu, ada *atsar* shahabat lainnya yang dianggap kuat oleh Imam Malik dalam menjadikan pondasi istinbath hukumnya, sementara *jumhur fuqaha'* berpegang kepada *atsar* shahabat yang berasal dari Ibn Mas'ud, dan *atsar* ini tidak di akui oleh Imam Malik, beliau memandang bahwa sanad *atsar* tersebut *syaz* (janggal), sehingga tidak boleh di'amalkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	
LEMBAR PENGESAHAN	i
NOTA DINAS	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II SELAYANG PANDANG TENTANG IMAM MALIK	11
A. Riwayat Hidup Imam Malik ibn Anas	11
B. Pendidikan Imam Malik ibn Anas.....	13
C. Al-Muwatta' Karya Imam Malik ibn Anas	16
D. Sumber Hukum Yang Dipakai Imam Malik	17
E. Metode Istimbath Hukum Imam Malik	18

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR.....	23
A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum Mahar.....	23
1. Mahar.....	23
2. Dasar Hukum Mahar	30
B. Kedudukan Mahar	34
C. Jenis-Jenis Mahar	39
D. Syarat Sahnya Mahar Dan Hikmah Mahar	42
BAB IV PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MAHAR	
SUAMI MENINGGAL <i>QABLA AL-DUKHUL</i>.....	52
A. Pendapat Imam Malik tentang Mahar yang Tidak Disebutkan Dalam Akad dan Suami Meninggal <i>Qabla Al-Dukhul</i>	52
B. Pendapat Mayoritas <i>Fuqaha'</i> tentang Mahar yang Tidak Disebutkan Dalam Akad dan Suami Meninggal <i>Qabla Al-Dukhul</i>	61
C. Analisa Penulis	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Perkawinan merupakan fitrah yang dianugerahkan pada setiap manusia sejak zaman dahulu, yaitu ketika diciptakannya Adam dengan istrinya Hawa. Perkawinan bukan saja dambaan setiap insan, tetapi juga naluri atau tabiat bagi makhluk hidup lainnya. Melalui perkawinan, Allah SWT mengkaruniakan kepada manusia rasa cinta, kasih dan sayang di antara suami dan istri.

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang mulia. Dipandang sentral, karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 2007), Cet. Ke-5, h.114.

Ketika membicarakan masalah perkawinan, banyak hal yang harus diperhatikan antara lain adalah mahar, karena salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab perkawinan adalah kewajiban calon suami untuk memberi mahar. Sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4.



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa', Ayat 4)²

Mahar yang diberikan kepada seorang istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini senada dengan hadist Rasulullah SAW. yang berbunyi:

... : ۚ ۚ ۚ

ۚ : ۚ

ۚ : ۚ

(³)

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), h.77

³ Abu Isa Muhammad ibn Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, th.), Juz 2, h. 360-361.

Artinya : ...Nabi bersabda lagi kepadanya: “Carilah, meskipun hanya sebetuk cincin dari besi”. Lelaki itu pun mencoba mencarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada laki-laki tadi: “Apakah kamu hafal sedikit saja dari ayat-ayat Al-Quran”. Lelaki tersebut menjawab: “Tentu saja, aku hafal surah ini dan surah ini”. Ada beberapa surat yang ia sebutkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Kalau begitu aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin surat Al-Quran yang kamu hafal”. (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).

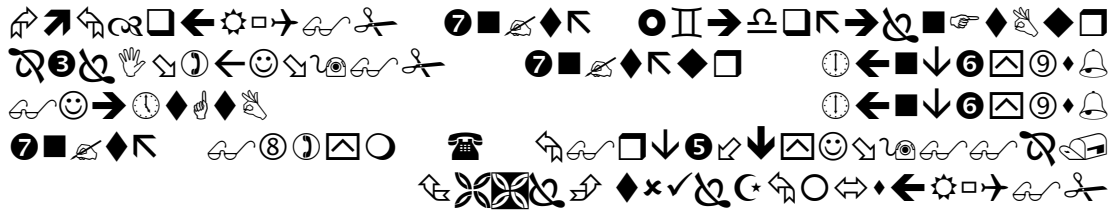
Wajah dilalah dari hadits ini adalah perintah Rasulullah SAW sendiri pada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Perintah itu menunjukkan kepada wajib karena Nabi SAW tetap menyuruhnya untuk mencari sampai beberapa kali, sehingga beliau mengatakan: “*Meskipun sebetuk cincin dari besi*”⁴.

Menurut hukum perkawinan dalam Islam, suatu perkawinan dapat dilakukan walaupun tanpa menyebutkan mahar dalam ‘akad. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* bahwa dibolehkan akad nikah tanpa menyebutkan mahar terlebih dahulu, dan ini telah menjadi ijma’ ulama, karena firman Allah dalam surat *Al-Baqarah*⁵, yaitu ayat 236 yang artinya:



⁴ *Ibid.*, h. 362.

⁵ Ibn Rusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muaqtashid*, (Darul-Fikr, tt), jilid 2, h. 19



“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Surat Al-Baqarah: 236)⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan yang berlangsung tanpa menyebutkan mahar atau menentukan mahar dalam ‘akad akan menimbulkan beberapa alternatif yaitu mahar tersebut akan diperlakukan seperti mahar *mitsil* jika telah terjadi dukhul (hubungan suami istri) atau mahar tidak diwajibkan bagi suami kecuali *mut’ah* (pemberian).

Dalam kitab *kifayahatul akhyar*, Imam Taqiyuddin Abi Bakar mengatakan bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan, seperti itu juga yang dikatakan oleh *al-Ashab* (sahabat-sahabat Imam Syafi’e), karena maksud utama pernikahan adalah *al-Istimta’* dan mendapatkan keturunan⁷, jadi *menafikan* mahar dalam perkawinan tidak menyebabkan batal atau rusaknya perkawinan.

⁶ Depag RI, *Op.cit.*, h. 38

⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *kifayatur akhyar*, (Semarang: Dar Al-Ihya, 1989), h.61

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa menghilangkan (*menafikan*) mahar dalam perkawinan jelas dapat merusak perkawinan⁸. Hal ini disebabkan mahar adalah salah satu rukun dalam rukun-rukun perkawinan, kecuali mahar yang belum diselesaikan oleh suami yang meninggal dunia *qabla al-dukhul*.

Selain itu, permasalahan lain yang dapat diteliti dalam persoalan ini adalah bahwa mahar dapat digugurkan secara keseluruhan dari tanggungan suami apabila terlaksana perkawinan *tafwidh*⁹, kemudian terjadi thalak *qabla al-dukhul*¹⁰. Akan tetapi jika terjadi kematian suami dalam keadaan *qabla al-dukhul*, terjadi perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*'. Menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad dan Imam Daud terhadap hal ini suami diwajibkan membayar mahar *mitsil*, hal senada juga disampaikan Imam Syafi'e, namun Imam syafi'e mempunyai dua pendapat. Pendapat ini adalah tidak wajib mahar dan wajib mahar *mitsil*. Berbeda halnya dengan Imam Malik yang mengatakan bahwa apabila suami meninggal sebelum *dukhul* dan suami belum menentukan mahar dalam pernikahan, maka pihak isteri tidak mendapatkan mahar, yang ada hanya mut'ah dan warisan¹¹.

⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiyyah, *th*), juzu' 4, h. 123

⁹ *Tafwidh*: Perkawinan yang tidak disebutkan mahar dalam 'akad nikahnya. *Tafwidh* ini disandarkan pada orang yang berhak atas mahar yaitu wanita, seperti dikatakan oleh wanita yang telah baligh -baik masih perawan atau tidak- kepada walinya "kawinkan aku tanpa mahar" maka wali mengawinkannya dengan menafikan mahar atau diam dari menyebutkan mahar. Lihat *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Dar Al-Ihya, 1989), hal. 61

¹⁰ Abdul Rahman al-Jaziri, *op.cit*, h.120

¹¹ Ibn rusyd, *Op.cit*, h. 20

Berdasarkan studi pendahuluan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MAHAR SUAMI MENINGGAL *QABLA AL-DUKHUL*”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas dibatasi pada masalah mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan suami meninggal sebelum *dukhul*, dan disinilah pendapat Imam Malik berbeda dengan mayoritas ulama lainnya, seperti: Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi’e.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pendapat Imam Malik terhadap mahar yang tidak ditetapkan dalam ‘aqad dan suami meninggal *qobla al- dukhul*?
- 2) Bagaimana pendapat *jumhur fuqaha*’ terhadap mahar yang tidak ditetapkan dalam ‘aqad dan suami meninggal *qobla al- dukhul*?
- 3) Bagaimana analisa penulis terhadap mahar yang tidak ditetapkan dalam ‘aqad dan suami meninggal *qobla al- dukhul*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Imam Malik terhadap mahar yang tidak ditetapkan dalam 'aqad dan suami meninggal *qobla al- dukhul*.
2. Mengetahui pendapat *jumhur fuqaha*' terhadap mahar yang tidak ditetapkan dalam 'aqad dan suami meninggal *qobla al- dukhul*.
3. Mengetahui analisa penulis terhadap mahar yang tidak ditetapkan dalam 'aqad dan suami meninggal *qobla al- dukhul*.

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah Ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam, khususnya masalah mahar suami meninggal *qabla al-dukhul*.
2. Menambah bahan referensi untuk melakukan peneletian-penelitian selanjutnya.
3. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam konsentrasi Hukum Islam pada program sarjana Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karangan ilmiah, maka penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan tersebut akan memegang peranan yang sangat penting, karena hal inilah yang menentukan suatu penulisan itu bisa sampai kepada tujuan. Dengan demikian, penggunaan metode pembahasan bagi suatu penulisan merupakan suatu hal yang menentukan bermutu atau tidaknya dari penulisan yang bersangkutan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data yang diperlukan maka dilakukan penelaahan terhadap kitab-kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data tersebut di kumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatife ini data yang digunakan adalah data skunder, jenis datanya yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu: *Al-Muwatta'* jilid II
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan terhadap bahan hokum primer. Dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh lainnya, seperti *Syarah Zarqany*, *Fiqh Islami Waadillatuhu*, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, *Malik Hayatuhu wa 'Asruhu*, *Ara-uhu wa Fiqhuhu*, dan berbagai kitab lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan, dimana dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran fuqaha yang ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tersebut yang akan dijadikan sebagai sumber primer, yaitu karya fuqaha yang dijadikan sebagai subjek penelitian, disamping itu dilengkapi oleh sumber data skunder, yaitu bahan pustaka yang menunjang sumber data primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang pemikiran maupun unsur lainnya, penelaahan isi salah satu bahan pustaka di cek dengan bahan pustaka yang lainnya.
- d. Mengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan di gunakan dan mana yang tidak. Kemudian, mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif sebagai berikut:

- 1) *Deduktif*: Membahas data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.
- 2) *Induktif*: Membahas data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum.

- 3) *Content Analysis*: yaitu suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan komunikasi. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

- Bab I Merupakan pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Selayang pandang tentang Imam Malik bin Anas yang berisikan riwayat hidup Imam Malik bin Anas, pendidikan, karya monumentalnya, sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik, serta metode istinbath hukum Imam Malik.
- Bab III Merupakan tinjauan umum tentang mahar, yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, kedudukan mahar, jenis-jenis mahar, syarat-syarat sah mahar dan hikmah disyari'atkan mahar.
- Bab IV Pendapat Imam Malik tentang mahar suami meninggal *qabla al-dukhul*, yang berisikan: mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan suami meninggal *qabla al-dukhul*, pendapat mayoritas *fuqaha'* mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan suami meninggal *qabla al-dukhul*.

Bab V Merupakan penutup dari semua bab yang telah dibahas, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

SELAYANG PANDANG

TENTANG IMAM MALIK IBN ANAS

A. Riwayat Hidup Imam Malik ibn Anas

Dilahirkan di Madinah al-Munawwarah dengan nama Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Harist bin Ghaiman bin Khusail bin Amr bin al-Harist al-Ashbahi al-Humairi. Nenek moyang nya berasal dari Bani Tamim dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Tentang kelahiran Malik bin Anas Adz-Dzahabi berkata, “menurut pendapat yang lebih shahih Imam Malik lahir pada tahun 93 H, yaitu pada tahun dimana Anas, pembantu Rasulullah, meninggal, Malik tumbuh dalam keluarga yang bahagia dan berkecukupan”¹. Dalam satu pendapat Imam Malik lahir pada tahun 90 H, dan beliau termasuk pengikut Tabi’in berdasarkan pendapat shahih, dan ada juga yang berpendapat beliau adalah Tabi’in².

Imam Malik dikandung ibunya³ selama tiga tahun, ada juga pendapat yang mengtakan dua tahun, sementara pendapat yang masyhur di kalangan ulama

¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham Lc., dan Asmu’i Taram Lc., (Pustaka Al-Qausar, 2007), Cet ke-2, h. 260

² Sayid Bakri ibn sayid Muhammad Syatha Al-Dimyathi Al-Misri, *I’anatuththaalibin*, (Indonesia: Dar Al-Ihya) Jilid 1, h. 16

³ ‘Aliyah binti syuraik, lihat-Fuad Kauma, *Perjalanan Spritual Empat Mazhab*

adalah tiga tahun⁴. Dari kecil keistimewaan Imam Malik telah nampak, yaitu kecerdasan otaknya dan ketekunannya dalam mempelajari al-Qur'an, sehingga Imam Malik telah hafal al-Qur'an di luar kepala saat usia masih kecil⁵.

Sejak kecil pula Imam Malik dikenal mempunyai akhlaq yang amat baik, hingga setelah dikenal menjadi Imam besarpun, ia tetap memiliki budi pekerti yang budiman, suka menolong orang miskin, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah dan selalu bertindak tegas dalam kebenaran⁶.

Wataknya yang pendiam menjadi ciri khasnya, tidak suka membual dalam pembicaraannya, apalagi membicarakan orang lain, dalam hal ini ia pernah berkata: “di Madinah ini ada orang yang tidak bernoda, tetapi lantaran mereka ini suka membicarakan orang lain, maka mereka ini sekarang menjadi bernoda. Sebaliknya ada orang yang mempunyai noda, tetapi lantaran mereka tidak suka membicarakan orang lain, maka noda merekapun jadi tidak terlihat”⁷.

Kehidupan Imam Malik sebahagian besarnya dilalui di Madinah, dan sepanjang riwayat yang ada beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah, atau merantau kedaerah lain untuk menuntut ilmu, oleh karena itu Imam Malik hidup sesuai dengan kondisi masyarakat Madinah dan Hijaz.

⁴ Muhammad Abu zahrah, *Malik, hayatuhu wa 'asruhu, ara-uhi wa fiqhuhu*, (Dar-Fikr al-arabi, tth), h. 24

⁵ Fuad Kauma, *Perjalanan Spritual Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), Cet. Ke-3, h.15

⁶ *Ibid*, h. 16

⁷ *Ibid*.

Imam Malik dikenal sebagai seorang mujtahid yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya meskipun harus berseberangan dengan paham rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh khalifah al-Manshur dari Bani Abbasiyah di Baghdad⁸.

Imam Malik dalam hidupnya terus berkiprah sebagai seorang ahli hadist sekaligus guru besar fiqh. Kesibukannya dalam bidang ini tidak pernah berhenti, sampai usianya menginjak 90 tahun, maka pada usia yang ke 90 tahun itu Imam Malik meninggal dunia. Tepatnya pada tanggal 10 Rabi'ul Awwal tahun 179 H. Imam Malik dimakamkan di perkuburan Baqi', dimana keluarga Rasulullah juga dimakamkan disitu, tempatnya di luar Madinah⁹.

B. Pendidikan Imam Malik bin Anas

Kegiatan pendidikan Imam Malik berlangsung di kota Madinah. Imam Malik mengambil ilmu fiqh dari para ulama ahli fiqh di kota Madinah, diantara gurunya yang paling terkenal adalah Abdullah bin Harmaz. Kepada Abdullah bin Harmaz Imam Malik sempat agak lama menimba ilmu, bahkan sampai Imam Malik tinggal dirumahnya, kemudian Imam Malik belajar lagi kepada gurunya yang lain yaitu Imam Raba'ah Ar-Ra'ji, kemudian pelajaran-pelajaran hadistnya ia terima dari Imam Nafi'¹⁰. Karena sangat gemarnya Imam Malik menuntut ilmu,

⁸ Huzaeman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Legos, 1997), h. 105

⁹ *Op. cit*, h. 30

¹⁰ *Op. cit*, h. 16

hingga gurunya berjumlah sekitar 700 orang, tiga ratus diantaranya adalah Tabi'in¹¹.

Ketika menginjak usia tujuh belas tahun, Imam Malik sudah mendapatkan ijazah untuk menyelenggarakan pengajian sendiri di mesjid Madinah. Imam Malik menanggapi pemberian ijazah ini dengan berkata: “saya tidak mengadakan pengajian sendiri kecuali sudah tujuh puluh ulama memberikan kesaksian bahwa saya telah benar-benar pantas untuk melakukan itu”¹².

Kecintaan dan minatnya yang mendalam terhadap ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, Ayyub bin Abu Tamimah As Sakhtiyani, Ayyub bin Habiib Al Juhani, Ibrahim bin ‘Uqbah, Isma’il bin Abi Hakim, Ibnul Mubarak, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo’nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa’id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush’ab, Al Auza’i, Sufyan Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan Ismail Ibnu Muhammad bin Sa’ad. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Pernah suatu kali Khalifah Mansur

¹¹ Sayid Bakri, *Op. cit.*

¹² Husain Hamid Hasan, *al-Madkhal Lidirasat al- Fiqh al-Islami*, (Mesir ttp, 1981), h. 97

membahas sebuah hadits dengan nada agak keras. Sang imam marah dan berkata, "Jangan melengking bila sedang membahas hadits Nabi." Demikian pula, Imam Malik lebih menghormati ulama dan cendekiawan dari apapun, bahkan kepada khalifah sekalipun. Mencium tangan khalifah apabila menghadap di istana telah menjadi tradisi yang tertanam, namun Imam Malik tidak pernah sekalipun melakukannya. Namun sebaliknya, ia sangat hormat pada para cendekiawan, sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri kepada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya.

Terhadap murid-muridnya, beliau juga menanamkan kecintaan kepada ilmu dengan memberikan penghormatan dan kemuliaan terhadap ilmu. Diriwayatkan, dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah, Khalifah Bani Abbasiyyah, yang saat itu Khalifah Harun Al Rasyid, tertarik mengikuti kajian kitab al Muwaththa' (himpunan hadis) yang diadakan Imam Malik. Karena khalifah ingin diajari seorang diri, maka ia mengutus orang untuk memanggil Imam. Namun Imam Malik menolak, dan memberikan nasihat kepada Khalifah Harun melalui utusannya, "Bila sebagai khalifah anda tidak menghormati ilmu, tak seorang pun akan menaruh hormat lagi. Manusia yang mencari ilmu, sementara ilmu tidak akan mencari manusia." Khalifah pun akhirnya bersedia menemui Imam Malik, namun meminta agar para jamaah meninggalkan ruangan tempat kajian itu diadakan. Namun, permintaan itu kembali tak dikabulkan Imam Malik. Beliau berkata, "saya tidak dapat mengorbankan kepentingan umum hanya

untuk kepentingan seorang pribadi." Sang khalifah pun akhirnya mengikuti ceramah bersama dua putranya dan duduk berdampingan dengan rakyat kecil¹³.

C. Al-Muwatta' Karya Imam Malik bin Anas

Imam Malik meninggalkan pusaka yang amat berharga bagi ummat Islam dalam bidang ilmu keagamaan, terutama bagi mereka yang bermazhab Maliki. Pusaka tersebut secara turun temurun diwariskan dari satu angkatan ke angkatan lainnya hingga sekarang. Warisan itu berupa hasil karya Imam Malik sendiri yaitu berupa kitab besar yang berjudul "*Al-Muwatta'*". Kitab ini berisi antara lain hadist-hadist Rasulullah SAW, riwayat dan atsar-atsar para sahabat serta tabi'in¹⁴.

Tentang kitab *al-Muwatta'* ini al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi berkata, "*al-Muwatta'* adalah dasar utama dan inti dari kitab-kitab hadist, sedang karya al-Bukhari adalah dasar kedua, dan dari keduanya muncul kitab yang menjadi penyempurna, seperti karya Imam Muslim dan At-Turmizi. Imam Malik mengarang *al-Muwatta'* bertujuan untuk mengumpulkan hadist-hadist shahih yang berasal dari Hijaz, dan didalamnya disertakan pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in¹⁵.

Sejauh ini kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik ini telah di syarah oleh para ulama kedalam beberapa kitab, di antaranya:

¹³ <http://www.taghrib.ir/indonesia/index.php>

¹⁴ Fuad Kauma, *Op. cit.*, h. 30

¹⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Op. cit.*, h. 274

1. *al-Tamhid lima fi al-Muwata' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, karya Abu Umar ibn Abdil Bar al-Namri al-Qurtubi (w. 463 H)
2. *Al-Istizkar fi Syarh Mazaahib 'Ulama al-Amsar*, karya Ibn 'Abdil Barr (w. 463 H.)
3. *Kasyf al-Mugti fi Syarh al-Muwatta'*, karya Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H.)
4. *Tanwirul Hawalik*, karya Jalaluddin as-Suyuti (w. 911 H)
5. *Syarah al-Ta'liq al-Mumajjad ala Muwatta'*, Imam Muhammad karya al-Haki ibn Muhammad al-Laknawi al-Hindi
6. *al-Muntaqa* karya Abu Walid al-Bajdi (w. 474 H.)
7. *al-Maswa* karya al-Dahlawi al-Hanafi (w. 1176 H.)
8. *Syarh al-Zarqani* karya al-Zarqani al-Misri al-Maliki (w. 1014 H)¹⁶.

Pada dasarnya kitab *al-Muwatta'* merupakan kitab yang berisi ribuan hadist Rasulullah Saw., sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Abu Hasan bin Fahd, beliau mengatakan bahwa didalam kitab *al-Muwatta'* telah tercatat 10.000 hadist. Dari sepuluh ribu hadist ini disaring, diteliti, dan dipilih, pada akhirnya di ambil yang ada sanadnya saja, hingga tinggal 500 hadist saja¹⁷.

D. Sumber Hukum Yang Dipakai Imam Malik

Sebenarnya Imam Malik sendiri belum menulis dasar-dasar fihiyyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab inilah

¹⁶ http://uin-suka.info/ejurnal/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=43

¹⁷ Fuad Kauma, *Op.cit.*, h. 31

yang kemudian menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Malik, dan kemudian menulisnya. Dasar-dasar fiqh itu, kendati tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, namun punya kesinambungan pemikiran yang sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa isyarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih-lebih dalam kitab *al-Muwatta'*. Dalam *al-Muwatta'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa beliau mengambil “tradisi-tradisi orang madinah” sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadist, dan mengambil Hadist *Munqathi'* dan *Mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah¹⁸.

Al-Qurafi dalam kitabnya *Tanqih al-Ushul* menyebutkan bahwa dasar-dasar hukum yang di gunakan Imam Malik adalah: *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *ijma'*, '*amal ahlul Madinah*, *qiyas*, *qaul shahabat*, *mashlahah mursalah*, '*urf*, *sad al-dhara'i*, *istihsan*, dan *istishab*¹⁹.

E. Metode Istimbath Hukum Imam Malik

Imam Malik merupakan seorang ulama besar, yang dikenal dikalangan para ulama sebagai orang yang sangat 'alim di bidang hadist, ini terbukti dengan adanya pernyataan para ulama, diantaranya yaitu Imam Syafi'e yang mengatakan:

¹⁸ Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 271

¹⁹ *Ibid*, h. 276

”apabila datang kepadamu hadist dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu²⁰.”

Adapun metode istinbath Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada²¹:

1. *Al-Qur'an*. Imam Malik menetapkan nash al-Qur'an sebagai rujukan awal dalam menetapkan hukum, karena al-Qur'an merupakan sumber pertama Islam dalam menelaah hukum. Dimana sikap yang sama juga dilakukan oleh ulama-ulama lain.
2. *Al-Sunnah*. Intensitas Imam Malik dalam mempergunakan hadist adalah sangat tinggi, berbeda dengan Imam Hanifah, Imam Malik mendahulukan hadist ahad ketimbang rasio. Inilah satu argumentasi bahwa beliau dikelompokkan kepada ahlul hadist.
3. *Ijma'*. Imam Malik menjadikan ijma' ulama sebagai sandaran hukum yang mesti di perhatikan setelah Sunnah, yang dimaksud dengan ijma' adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ahli fiqh dan ilmu pengetahuan²².
4. *'Amal Ahlul Madinah*. Menurut Ibnu Taimiyah, *'amal ahlul Madinah* ini artinya adalah *ijma' ahlul Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan

²⁰ Huzaeman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Legos, 1997), h. 105

²¹ *Ibid*, h. 105

²² Ahmad Asy-Syurbasi, Terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam MAzhab*, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara, 1991), Cet. 1, h. 89

amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan yang orang Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah²³.

5. *Qaul shahabat*. Yang dimaksud dengan fatwa shahabat ini adalah fatwa sahabat besar, yaitu pengetahuan mereka terhadap sesuatu didasarkan kepada *al-Naqli*. Menurut Imam Malik, para sahabat tersebut tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang di ketahui dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau beliau mensyaratkan fatwa tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadist marfu' yang dapat di'amalkan, dan fatwa sahabat yang seperti ini lebih didahulukan daripada *qiyas*. Imam Malik memberikan bobot penuh kepada pendapat-pendapat sahabat dan bahkan memasukkannya kedalam kitab *al-Muwatta'*. Namu demikian, *ijma'* sahabat lebih di utamakan dari pada pendapat individu sahabat²⁴.
6. *Qiyas*. Imam Malik mendahulukan *qiyas* daripada *khavar ahad*²⁵, bahkan kalau *khavar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah, maka hal itu di anggap sebagai petunjuk bahwa *khavar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW., maka tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas*²⁶.

²³ Huzaeman Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 106

²⁴ Abu Ameenah Bilal Philip, Terj. M. Fauzi Arifin, *Asal dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), Cet. 1, h. 97

²⁵ Khabar ahad yaitu: Khabar yang tidak diriwayatkan oleh sekelompok jama'ah yang tidak mungkin tersalah, ini adalah lawan daripada *khavar mutawattir*, jadi khabar ini masih ada kemungkinan salah. Lihat Ahmad ibn Abdullathif, (*An-Nufahat 'ala syarhilwaraqat*), pada pembahasan *khavar ahad*.

²⁶ Huzaeman Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h. 109

7. *Istihsan*. Secara sederhana maksudnya adalah mencari sesuatu yang lebih sesuai. Istihsan lebih mementingkan masalah *juziyyah* atau masalah tertentu dari pada dalil *kully* atau dalil umum, atau dengan ungkapan lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syariat diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa mudharat tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang seperti itu harus dialihkan kepada *qiyas* yang lain yang tidak membawa kepada akibat negatif. Intinya, *istihsan* selalu melihat dampak dari ketentuan suatu hukum, jangan sampai suatu hukum membawa dampak merugikan, dampak suatu ketentuan hukum harus membawa masalah atau menghindari mudharat²⁷.
8. '*Uruf* (adat). Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga memanfaatkan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat diberbagai wilayah Islam sebagai sumber hukum skunder sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan syari'ah.
9. *Sadduz-Zara'i*. *Sadduz-Zara'i* adalah sarana atau jalan untuk sampai kepada suatu tujuan. Imam Malik menggunakan *sadduz-zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurutnya semua sebab atau jalan yang menuju kepada yang haram atau larangan, maka hukumnya adalah haram.
10. *Al-Mashlahah al-Mursalah*. Adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, dengan demikian *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan

²⁷ *Ibid.*, h. 109

syari'at yang diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*. Para ulama yang berpegang kepada mashlahah mursalah sebagai landasan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut²⁸:

- a. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar perkiraan sepintas saja.
- b. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum, bukan hanya mashlahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, artinya mashlahah tersebut harus merupakan mashlahah untuk kebanyakan orang.
- c. Mashlahah itu harus benar-benar bersifat umum dan tidak boleh bertentangan dengan nas atau *ijma'*.

²⁸ *Ibid.*, h. 111

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar Dan Dasar Hukum Mahar

1. Mahar

Mahar dalam bahasa Arab memiliki nama yang banyak, sebahagiannya adalah *al-Mahru* (المهر), contoh pemakaian dalam bahasa yaitu: مهرة المرأة , kalimat tersebut diungkapkan apabila aku telah memberikan mahar kepada perempuan. Ada juga dikatakan *shidaq* (الصداق) dengan *fathah shad* dan dengan *kasrah*. Sedangkan kata *shidaq* sendiri mempunyai beberapa pengucapan, seperti: *shaduqah*, *shadqatan*, dan *shudqatan*, maknanya adalah memberikan harta, yang dengan pemberian tersebut memberitahu bahwa suami gembira dengan akad nikah¹.

Abd Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mengatakan, mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun dalam jasa².

¹Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiyyah, *th*), juzu' 4, h. 94

² Abd Rahman Ghazali, MA, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-2, h. 84

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya “*Al-fiqhu ‘ala Mazahib Al-Arba’ah*” memberikan definisi mahar sebagai berikut:

إِسْمُ الْمَالِ الَّذِي يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فِي قَابِلَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا وَفِي وَطْءٍ
بشبهة أو نكاح فاسد³

Artinya: *Nama harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan pada saat ‘aqad nikah, sebagai imbalan untuk bersenang-senang dengannya, dan dalam kejadian watha’ syubhah atau watha’ pada nikah fasad.*

Untuk pengertian yang sama digunakan juga kata-kata sinonim (*muradif*) *Al-Mahar* yaitu *Al-Shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba’, ‘uqr, ala’iq, thaul*, dan *nikah*⁴.

Allah SWT berfirman pada surat an-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... (سورة النساء-٤)

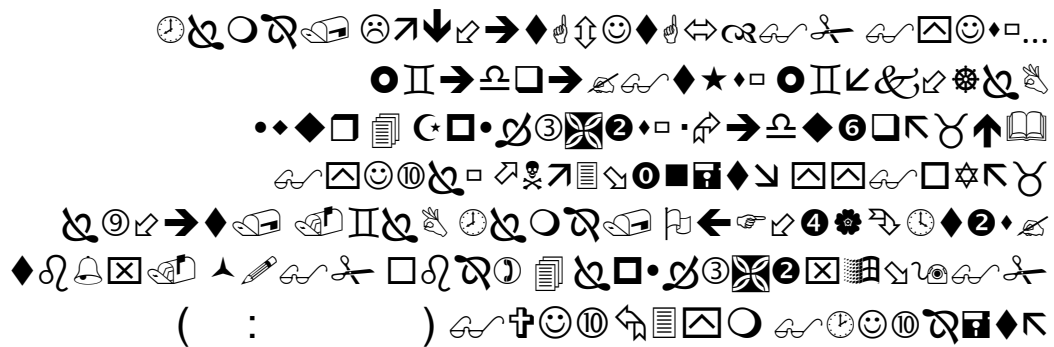
Artinya: “*Berikan maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai suatu pemberian dengan penuh kerelaan*”... (An-Nisa’:4)⁵.

Firman Allah SWT selanjutnya pada surat An-Nisa’ ayat 24 yang berbunyi:

³ ‘Abdul Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 94

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu*, (damsyiq-suriyah: Dar Al-Fikr, t.t), Juz 9, h. 237

⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), h.77



Artinya:...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu⁶. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (An-Nisa' 24)⁷

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lain atau siapapun walau sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suami sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri⁸.

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang redaksinya, tetapi maksud dan tujuannya adalah sama. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan mahar sebagai berikut:

⁶Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

⁷ *Ibid.*, h. 82

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 237

المهر: هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها

حقيقة⁹

Artinya: *Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya 'aqad atau dukhul.*

Menurut Ulama Syafi'iyah mahar, yaitu:

بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تقويت بُضْع قهراً¹⁰.

Artinya: *Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya 'aqad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).*

Menurut Ulama Hanabilah, mahar adalah:

بأنه العوض في النكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم، أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكروهة¹¹

Artinya: *Suatu imbalan dalam nikah baik disebutkan di dalam 'aqad atau diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim,*

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, sebagaimana yang tersebut dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, mahar ialah:

12 ^{١٢} ^{١٣} ^{١٤}

Artinya: “*Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimta' (bersenang-senang) dengannya.*”

Dari beberapa definisi di atas, jelas bahwa definisi yang dikemukakan ulama Hanafiah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh mazhab-mazhab lain (termasuk di dalamnya mazhab Maliki) tidak mengadakan pembatasan hanya pada harta saja. Dari sini dapat dipahami bahwa selain ulama Hanafiyah yang salah satunya adalah mazhab Maliki memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti; jasa atau manfaat, seperti mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan sebagainya.

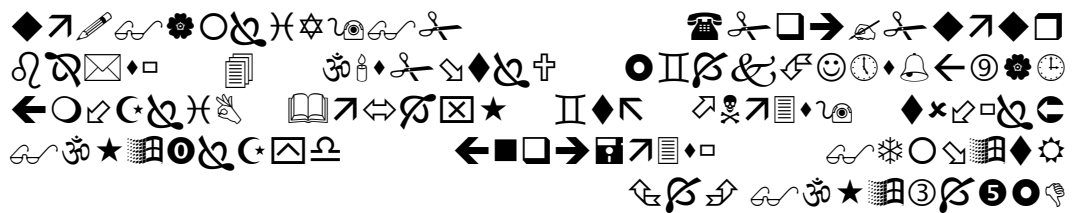
Dengan kata lain bahwa mahar itu boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Jika berbentuk barang atau harta, disyaratkan haruslah barang tersebut berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau

¹² *Ibid.*

harga, halal lagi suci. Sedangkan bila maharnya berbentuk jasa atau manfaat, maka disyaratkan harus dalam arti yang baik¹³.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, baik menurut mazhab Maliki atau menurut mazhab yang lain, pada dasarnya mahar adalah pemberian wajib dari setiap calon suami kepada istri yang melalui pemberian mahar itu dapat menghalalkan terjadinya hubungan suami istri. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya, sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyyah.

Pada masa jahiliyyah mahar digunakan sepenuhnya oleh wali si isteri. Dengan kedatangan Islam, wanita mendapat perhatian besar dengan memiliki hak penuh terhadap mahar yang diberikan suami, tanpa boleh diganggu oleh orang lain termasuk walinya tanpa izin dan kerelaan dari wanita tersebut¹⁴. Sebagaimana firman Allah:



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Qahirah: Fathu I'lami al-Arabi, *tth*), Jilid ke-2, h. 101

¹⁵ Depag RI, *Loc.cit*

Sayid sabiq menafsirkan ayat tersebut dengan memberikan mahar sebagai pemberian wajib, bukan sebagai nilai tukar atau *'iwadh*. Jadi, kalau isteri memberi sesuatu dari mahar itu dengan baik-baik atau tanpa unsur paksaan, malu, maka boleh mengambilnya. Namun, apabila pemberian itu dilakukan karena malu, atau takut maka pemberian itu tidak halal untuk di ambil¹⁶.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mahar adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mahar atau maskawin dalam ajaran agama Islam sama sekali bukanlah dimaksud sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar adalah sebagai bagian dari lambang atau simbol atau tanda bukti bahwa suami menaruh cinta kasih terhadap wanita calon istri yang akan dinikahnya. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina suatu kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya.¹⁷

Mahar yang diberikan pada acara 'aqad nikah tersebut, dapat juga dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa setelah hidup berumah tangga nanti, suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, berupa memberi nafkah bagi istri dan keturunannya kelak. Hal tersebut ditunjukkan oleh seorang calon suami pada saat awal pernikahannya, yaitu dengan kerelaan hati memberikan sebagian dari

¹⁶ Sayid Sabiq, *op.cit.*

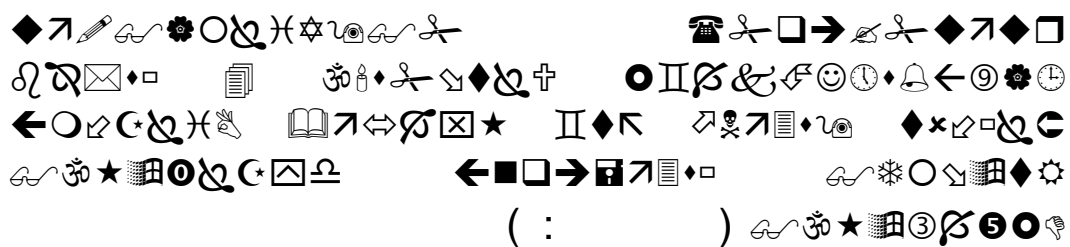
¹⁷ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1938), Juz 6 h. 238. Dan Lihat Abdurrahman Al-Jaziriy, *op.cit.*, h. 108

hartanya kepada seorang (calon) yang akan menjadi istrinya. Demikian pula sebaliknya, calon istri dengan kesediannya menerima mahar dari calon suami, membuktikan pula bahwa ia dengan rela hati bersedia untuk menjadi istri dari calon suaminya, atau ia rela menerima kekuasaan dan kepemimpinan suami terhadap dirinya¹⁸.

2. Dasar Hukum Mahar

a. Al-Quran:

Dalam surat An-Nisa' ayat 4 disebutkan:



Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan¹⁹. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa': 4)²⁰*

¹⁸ *Ibid.*, h.109.

¹⁹ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

²⁰ Depag RI, *loc.cit.*

Mahar ini adalah sebagai pemberian wajib dari para suami kepada para isteri, sebagai bentuk kecintaan suami terhadap isterinya, di sisi lain mahar juga merupakan lambang kemuliaannya para isteri²¹.

Jihat dilalah dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT telah memerintahkan pada suami-suami untuk membayar mahar pada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan kepada hukum sunat atau mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar hukumnya wajib bagi suami untuk diberikan kepada istrinya, karena tidak ada *qarinah* yang memalingkan dari makna wajib kepada makna yang lain²².

b. Al-Sunnah

Terdapat banyak hadits Rasulullah SAW sebagai dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Di antaranya ialah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فَمَلَاحَظَهَا فَمِنْ غَيْرِهَا فَهُوَ كَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فَجَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهَا».

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 238

²² Lihat usul fiqh, Ahmad ibn Abdul Lathif, *Annufahat 'ala syarhil waraqat*, pada pembahasan amar

. : . : . :
 : : : :
 : :
 :
 23 () . : :

Artinya: *Dari Sahl bin Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah SAW kedatangan tamu seorang wanita yang mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu". Lalu wanita itu berdiri cukup lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah SAW, nikahkanlah aku dengannya jika memang engkau tidak ada minat kepadanya". Rasulullah SAW lalu bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa diberikan sebagai maskawin kepadanya?" Laki-laki itu menjawab: "Saya tidak mempunyai apa-apa kecuali kain sarung yang sedang saya pakai ini". Nabi berkata lagi: "Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk dengan tidak mengenakan kain sarung lagi. Karena itu carilah yang lain". Lalu ia mencari tapi tidak mendapatkan sesuatu. Nabi bersabda lagi kepadanya: "Carilah, meskipun hanya sebetuk cincin dari besi". Lelaki itu pun mencoba mencarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada laki-laki tadi: "Apakah kamu hafal sedikit saja dari ayat-ayat Al-Quran". Lelaki tadi menjawab: "Tentu saja, aku hafal surah ini dan surah ini". Ada beberapa surat yang ia sebutkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "Kalau begitu aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin surat Al-Quran yang kamu hafal". (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).*

Hadist ini menjadi *daal* (dalil atau penunjuk) kepada wajib terhadap suami untuk menunaikan mahar kepada isteri, sisi *dilalah* nya adalah perintah Rasulullah SAW kepada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai

²³ Abu Isa Muhammad ibn Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, tth.), Juz 2, h. 360-361.

mahar, sehingga sampai beliau mengatakan : “*Meskipun sebentuk cincin dari besi*”²⁴.

Dalam hadits di atas, pertama sekali Nabi SAW menyuruh mencari sesuatu untuk dijadikan mahar. Kata “*sesuatu*” pada dasarnya mencakup segala sesuatu, baik bernilai atau yang tidak bernilai. Namun ketika Rasulullah SAW mengatakan “*meskipun sebentuk cincin dari besi*” dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan “*sesuatu*” sebagai mahar dalam hadits di atas adalah sesuatu yang bernilai. Maka tidak bisa dijadikan mahar benda yang tidak bernilai seperti sebiji padi²⁵.

Berdasarkan hadits di atas dan juga hadits-hadits yang lain, jelaslah bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Oleh karena itu tidak mungkin diadakan persetujuan (ijma’) untuk meniadakannya. Namun masih perlu dikaji apakah mahar merupakan salah satu rukun atau syarat sahnya nikah. Jumhur ulama tetap berpendirian bahwa mahar tidak bisa dikatakan sebagai rukun nikah atau syarat sahnya nikah, tetapi hanya sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan ‘aqad nikah.

Jelas mahar adalah wajib, ia boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Kalau berupa barang, disyaratkan haruslah barang itu berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci.

²⁴ *Ibid.*, h. 362.

²⁵ *Ibid.*

Sedangkan bila maharnya berbentuk jasa atau manfaat, maka disyaratkan harus dalam arti yang baik²⁶.

c. Ijma'

Para ulama sepakat (ijma') bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam pernikahan dan mahar juga merupakan bagian dari syarat sahnya nikah, yang harus dipikul oleh setiap calon suami terhadap calon istrinya²⁷.

B. Kedudukan Mahar

Salah satu dari keistimewaan Islam adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang urusannya (menerima mahar). Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan harta miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam²⁸.

Begitu pula untuk kaum wanita, kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Wanita diberikan hak untuk memperoleh mahar, sedangkan laki-laki diwajibkan memberikan mahar, bilamana ia hendak mempersuntingkan

²⁶ *Ibid.*, h.254.

²⁷ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *op.cit.*, h. 328.

²⁸ *Op.cit.*, h. 329.

seorang wanita untuk dijadikan isteri. Mahar diberikan langsung kepada wanita yang dimaksudkan, bukan kepada wali atau ayahnya atau kepada orang yang mempunyai hubungan terdekat sekalipun. Selain wanita yang bersangkutan, tidak ada yang boleh mengganggu gugat mahar itu, kecuali atas izin dan kerelaannya sendiri²⁹.

Berdasarkan ijmak, baik dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini, masalah mahar menjadi sesuatu yang penting dalam setiap perkawinan. Bukti dari kepedulian umat Islam mementingkan kedudukan dan eksistensi (keberadaan) mahar adalah, bahwa sangat jarang ditemukan adanya adat atau tradisi suatu masyarakat yang meniadakan atau menghilangkan mahar dalam pelaksanaan perkawinan. Para fuqaha mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan ancaman hukuman, jika terjadi suatu usaha untuk menggugurkan hak memberi mahar. Sebagai mana yang disebutkan dalam kitab “*Maqashid Al-A'mmah Al-Syari'ah Al-Islami*” yang mengatakan:

أَمْ
يَهْ هُ هُ يَهْ

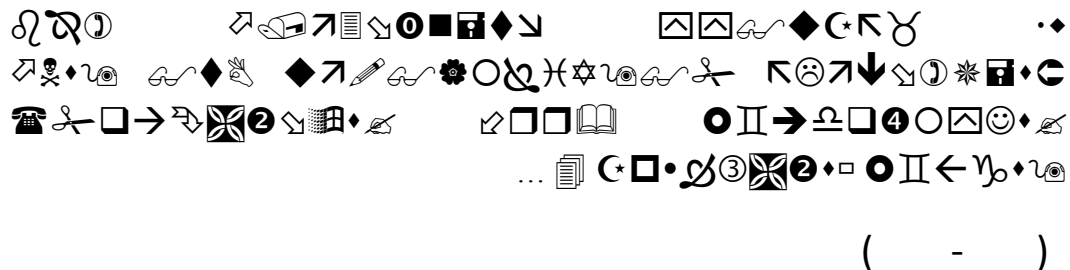
30

Artinya: *Para ulama telah berbeda pendapat pada pernikahan yang mensyaratkan tidak ada mahar di dalamnya setelah mereka sepakat atas kebolehan sahnya 'aqad dengan tidak menyebutkan mahar.*

²⁹ *Op.cit.*, h. 330.

³⁰ Yusuf Hamid Al-Amin, *Op.cit.*, h. 427.

Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, yaitu ada membolehkan dan ada yang tidak membolehkan sesuatu perkawinan yang berlangsung dengan menghilangkan atau meniadakan mahar dengan sengaja. Sementara itu hukum tidak menyebutkan, bahwa mahar dalam ‘aqad nikah adalah boleh, kebolehan tersebut merupakan ijma’ ulama yang di dasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:



Artinya: “Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (*campuri*) atau belum menetap bagi mereka maharnya...” (Al-Baqarah: 236)³¹

Mahar merupakan konsekuensi dan salah satu hukum dari sebagian hukum yang berhubungan dengan suatu perkawinan yang *shahih* dan berhubungan sebadan sesudah terjadinya perkawinan *fasid* serta hubungan sebadan yang disebabkan kesamaran (ketidakjelasan). Mahar diwajibkan atas suami untuk diberikan kepada istri dengan didahului oleh ‘aqad nikah yang sah. Kewajiban itu menjadi semakin kuat dengan terjadinya hubungan kelamin dengan istri atau

³¹ Depag RI, *op.cit.*, h. 38

bersenang-senang yang sewajarnya dengannya ataupun karena kematiannya. Baik mahar itu disebutkan dalam ‘aqad nikah dengan penyebutan yang benar atau tidak disebutkan atau ditiadakan ataupun disebutkan dengan penyebutan yang tidak benar. Hanya saja bila mahar itu disebutkan dalam ‘aqad nikah dengan penyebutan yang benar, maka yang telah disebutkan itu secara langsung (positif) menjadi hak istri dengan adanya ‘aqad tersebut. Jika tidak disebutkan, maka digantikan dengan mahar *mitsil* (persamaan) yang tetap menjadi hak istri³².

Mahar wajib pula atas suami kepada istrinya dengan terjadinya hubungan badan suami istri (dukhol), apabila hal itu terjadi setelah ‘aqad nikah yang *fasad* (batal, tidak sah) seperti pelaksanaan nikah tanpa dihadiri saksi-saksi atau setelah terjadinya kesamaran yang diakui keberadaannya, tanpa melalui pernikahan sama sekali. Sebagaimana seorang laki-laki menemui seorang perempuan di atas tempat tidurnya, kemudian ia menyangka perempuan itu istrinya dan lalu berhubungan badan dengannya. Pada hal ternyata perempuan itu adalah orang lain, bukan istrinya. Tetapi dalam hal ini, mahar itu menjadi sangat wajib sejak permulaan yaitu karena telah terjadinya hubungan badan³³.

Selanjutnya, bila *jima*’ itu dilakukan setelah terjadi kesamaran, maka yang wajib untuk perempuan itu adalah mahar *mitsil* secara mutlak. Kemudian apabila hubungan sebadan itu terjadi sesudah ‘aqad nikah yang *fasid*, maka jika mahar disebutkan ketika ‘aqad, wajib bagi perempuan itu menerima haknya dalam

³² Yusuf Hamid Al-Amin, *Op.cit.*, h. 428.

³³ Ahmad Al-Hajji Al-Qurdi, “*Ahkamul Mar’ati Fi Fiqhil Islamy*” *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, (Terj. Moh. Zuhri. Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 1986), h.33.

jumlah yang lebih kecil antara mahar *mitsil* dan mahar *musamma* (yang disebutkan). Jika mahar tidak disebutkan, maka wajib bagi laki-laki tersebut untuk memberikan mahar *mitsil* kepada wanita itu secara mutlak³⁴.

Dalil melalui kewajiban mahar atas suami untuk istrinya adalah Al-Quran Al-Karim, di antaranya firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4 (sebagai mana yang disebutkan dalam pembahasan sub bab terdahulu), juga terdapat di dalam sunnah Nabi baik Qauliyyah (sabda), Amaliyah (amalan) dan Takririyah (penetapan). Di antaranya adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, sementara beliau tidak berminat untuk menikahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengawinkannya dengan salah seorang yang hadir dalam pertemuan itu disertai izin dari perempuan tersebut terlebih dahulu. Beliau berkata kepada laki-laki yang mengawini perempuan itu:

35 ... ۖ ...

Artinya: "...Carilah, sekalipun hanya sebuah cincin dari besi..."

Hadits lainnya yaitu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin 'Auf ketika ia ditanya oleh Rasulullah SAW tentang keadaannya, maka ia menjawab: "*Saya telah mengawini seorang perempuan dengan maskawin seberat biji-bijian dari emas*".

³⁴ *Ibid.*, h. 34.

³⁵ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Terj. Adib Bishriy Musthofa), (Semarang: Asy-Syifa', 1994), Jilid 6, h. 613.

Rasulullah SAW bersabda:

36

...

...

Artinya: “....*Semoga Allah SWT memberkatimu, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing...*”

Rasulullah SAW menikah beberapa kali dan pernikahan itu tidak pernah terlepas dari mahar³⁷. Begitu pula ketika beliau mengawinkan empat orang puterinya dan mensyaratkan mahar untuk mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan mahar sangat penting di dalam suatu perkawinan. Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri.

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (talak) maka maskawin itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali.

C. Jenis-Jenis Mahar

³⁶ *Ibid.*, h. 614.

³⁷ *Ibid.*, h. 615.

Ulama fikih telah sepakat bahwa mahar itu ada dua jenis yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*³⁸.

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu: mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika ‘aqad nikah atau mahar yang dinyatakan kadar atau jumlahnya pada waktu ‘aqad nikah³⁹. Ulama fikih sepakat bahwa dalam perlaksanaannya, mahar *musamma* harus diberi secara penuh apabila telah bercampur (berhubungan badan) dan salah satu dari suami istri meninggal dunia. Mahar *musamma* juga wajib dibayar secara keseluruhan apabila suami telah bercampur dengan istrinya dan ternyata nikahnya rusak (fasid) dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya *mahram* sendiri atau dikira perawan ternyata telah janda atau hamil dari bekas suami terdahulu. Tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur, maka mahar hanya wajib dibayarkan setengah dari jumlah yang telah disebutkan dalam ‘aqad⁴⁰. Dasarnya adalah firman Allah SWT yang berbunyi:



³⁸ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, *tth.*) h. 15.

³⁹ *Ibid.*, h. 15.

⁴⁰ Abdur Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 93.

Artinya: “*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kaum tentukan itu....*”
(Al-Baqarah: 237)⁴¹.

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* ialah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan yang sama jumlahnya dengan yang diterima perempuan lainnya, umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, gadisnya, janda dan negerinya⁴². Dengan kata lain, mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar jumlahnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan atau mahar yang diukur (sepadan atau disamakan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi hal demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi, anak perempuan bude). Apabila tidak ada, maka mahar *mitsil* itu beralih dengan ukuran

⁴¹ Depag RI, *op.cit.*, h. 38

⁴² Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 107

wanita lain yang sederajat dengannya. Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan berikut⁴³:

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung ‘aqad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.

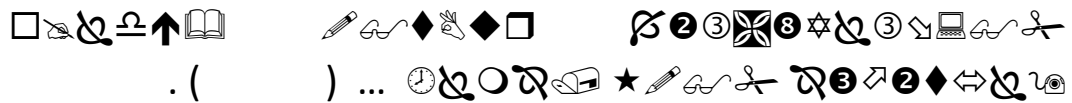
Wajibnya mahar dalam suatu perkawinan pada umumnya telah diketahui oleh umat Islam secara menyeluruh, hal ini dipahami di samping adanya *nash*, karena adanya praktek ‘aqad nikah yang jelas dan terbuka. Kewajiban memberi mahar tersebut tidak ada ketentuan ukurannya, karena Islam tidak menetapkan jumlah (besar atau kecilnya) mahar. Disebabkan adanya perbedaan kondisi (kaya dan miskin), mudah dan sulitnya rezeki serta tradisi yang membudayakan (dipakai). Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang⁴⁴. Dengan demikian, syari’at Islam tidak menetapkan besar atau kecilnya jumlah mahar yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri, karena di samping untuk menghindari dari kesulitan juga bertujuan untuk mencari ketulusan yang murni.

D. Syarat Sahnya Mahar Dan Hikmah Mahar

⁴³ Abdur Rahman Ghazaly, *op.cit.* h. 94.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h.108.

⁴⁵ Abdur Rahman Al-Jaziriy, *op.cit.*, h. 97.



Artinya: “Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu (binatang) yang disembelih atas nama selain Allah SWT dengannya..” (Al-Maidah: 3)⁴⁶

Dari pengertian ayat di atas dan hubungannya dengan kutipan yang mengharamkannya mahar dengan benda yang tidak bermanfaat menurut Islam, maka dapat diambil perhatian bahwa segala benda yang haram untuk dipergunakan atau dimanfaatkan haram pula dijadikan mahar.

b. Benda yang berharga

Di samping tidak dibolehkannya mahar dengan benda-benda yang telah diharamkan dalam Islam, mahar juga tidak dibenarkan dengan benda-benda atau sesuatu yang tidak ada harganya, seumpama sampah, biji buah-buahan, buah-buahan yang busuk dan lain sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqhu ‘ala Mazahib Al-Arba’ah* sebagai berikut:

. ⁴⁷ يَ أَ لِي يَ يَ أَ يَ

Artinya: *Mahar adalah sesuatu harta benda yang mempunyai harga, maka tidak sama mahar dengan harganya murah yang tidak mempunyai harga seperti biji gandum.*

⁴⁶ Depag RI, *op.cit.*, h. 107

⁴⁷ Abdur Rahman Al-Jaziriy, *op.cit.*, h. 97

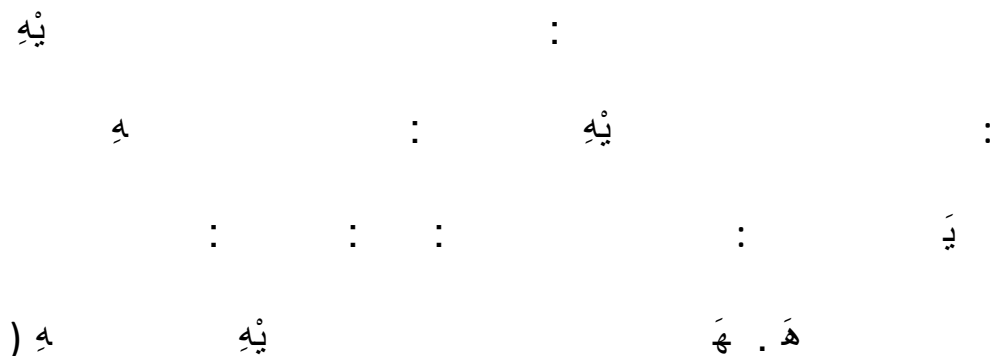
Dari kutipan di atas dapat dipahami bahawasanya mahar tidak dibenarkan dengan sesuatu benda yang tidak ada harga atau nilai, meskipun benda tersebut halal. Karena demikian itu terlalu mempermudah, seharusnya mahar tersebut hendaklah yang dipandang baik sebagaimana menurut pemahaman yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang –orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...” (Al-Baqarah:267)⁴⁸

Hal ini juga dapat dilihat pada hadits Nabi SAW:



49(

Artinya: *Dari Abi Salamah bin Abdurrahman berkata: Saya bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah SAW, berapa maskawin Rasulullah SAW? Aisyah*

⁴⁸ Depag, RI, *op.cit.*, h. 45

⁴⁹ Imam Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy*, (Mesir: Al-Mathba’ah Al-Misriyah Wa Maktabuha, 1924), Juz 3, h. 585.

menjawab: maskawin kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiah dan nash. Aisyah bertanya: tahukah engkau akan nash itu? Saya menjawab: tidak tahu. Aisyah berkata: setengah uqiyah, maka yang demikian itu lima ratus dirham. Inilah maskawin Rasulullah bagi istri-istrinya. (H.R Muslim)

Hadits di atas menunjukkan benda yang berharga seperti mata uang, karena itu ia (mata uang) dapat dijadikan mahar. Hal seperti ini terdapat dalam masyarakat sekarang, di mana pihak pengantin pria menyerahkan sejumlah uang kepada pihak pengantin wanita pada saat ‘aqad nikah sebagai maskawin.

c. Benda yang dimiliki

Di samping mahar tersebut sesuatu (benda) yang halal dan berharga, mahar juga harus benda yang dimiliki oleh seseorang dan dapat diserahkan kepada pengantin perempuan tersebut, dengan demikian mahar tidak boleh seperti burung yang terbang di udara atau ikan di laut yang belum dimiliki. Hal ini dijelaskan juga dalam kitab *Al-Fiqhu Islamiy Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

أَنْ يَسْلَمَ مِنَ الْغَرَرِ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ عَبْدٌ أَوْ بَعْرٌ شَارِدٌ وَشَبِيهُهُمَا⁵⁰

Artinya: Bahwa benar mahar itu terhindar dari tipuan, maka tidak boleh mahar itu seorang hamba sahaya yang lari (hamba sahaya tersebut tidak ada di depan mata) unta yang sesat (unta yang tidak ada di depan mata) atau sesuatu yang serupa keduanya.

Kutipan di atas menunjukkan tidak sah dijadikan mahar benda yang bukan miliknya, seperti barang titipan orang kepadanya dan tidak sah juga menjadikan

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *op.cit.*, h. 259.

mahar kalau tidak sanggup menyerahkannya, seperti miliknya yang telah dirampas orang dan tidak sanggup mengambilnya kembali.

2. Hikmah Mahar

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya, seperti hak untuk menerima mahar dan mengurusnya. Suami diwajibkan memberi mahar kepada istrinya bukan kepada ayahnya⁵¹.

Pensyari'atan mahar dalam perkawinan mengandung arti yang sangat dalam, antara lain: sebagai penghormatan terhadap yang dicintai, mengikat jalinan kasih sayang kepada istri serta mempererat hubungan antara keduanya, bukan dianggap pemberian atau ganti rugi⁵². Pemberian mahar merupakan salah satu jalan yang dapat menjadikan istri berhati senang dan *ridha* menerima kekuasaan suami terhadap dirinya.

Pemberian mahar itu kepada istrinya bukanlah harga dari wanita itu, dan bukan pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya, akan tetapi pensyari'atan mahar tersebut merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri antara keduanya, yaitu hubungan timbal balik

⁵¹ *Op.cit.*, h. 260.

⁵² *Op.cit.*, h. 261.

dengan senang hati dan penuh kasih sayang, dengan meletakkan status kepemimpinan dalam rumah tangga secara tepat dan bertanggungjawab⁵³.

Dengan adanya kewajiban memberi mahar kepada istri, terentangle tanggungjawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:



Artinya: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah SWT telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), oleh karena itu laki-lakilah yang menafkahkan hartanya...”* (An-Nisa’: 34)⁵⁴.

Hikmah pensyari’atan mahar dalam perkawinan Islam antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita, karena antara keduanya saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut baru dapat terpenuhi melalui ikatan perkawinan (‘aqad nikah). Mahar itu hanya ada dengan sebab ‘aqad nikah. Adapun pemberian seorang pria kepada seorang wanita

⁵³ *Op.cit.*, h. 262.

⁵⁴ Depag RI, *op.cit.*, h. 84

di luar ikatan perkawinan (bukan karena 'aqad), itu bukanlah dinamakan mahar sekalipun pemberian itu banyak sekali, dan pemberian seperti itu tidaklah menghalalkan antara keduanya.

2. Untuk menjadi suatu penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan pembelian. Karena itu tidak ada tawar-menawar dalam soal mahar. Makanya dalam hukum agama Islam, setiap suatu yang berharga boleh dijadikan mahar, walaupun hanya sepasang sandal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits.

55 ()

Artinya: *Diberikan oleh Muhammad bin Basyar, diberitakan oleh Yahya bin Saad dan diberitakan oleh Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'afar, ia berkata: diberitakan oleh Syu'bah dari 'Ashim bin Ubaidillah, ia berkata: saya mendengar dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya: bahwasanya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawinnya sepasang sandal. Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut: Relakah engkau dengan maskawin sepasang*

⁵⁵ Imam at-Tirmidzi, *Jami' Tirmidzi*, (Riyadh: Darussalam Lin-Nasyr Wa-Tauzi', 1999), h. 269.

sandal? Perempuan itu menjawab: Ya. Berkata Rasulullah SAW. maka aku membenarkannya. (Di riwayatkan oleh At-Tirmidzi).

3. Untuk menjadi suatu pegangan bagi istri, yang bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan suatu ikatan yang kuat, sehingga suami tidak mudah mencampakkan istri dengan begitu saja. Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

(النساء -)

Artinya: “Jika kamu ingin menggantikan istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberi kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun...” (An-Nisa’: 20)⁵⁶

Firman Allah SWT lagi dalam surat An-Nisa’ ayat 21:

(21 -)

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka

⁵⁶ Depag RI, *op.cit.*, h. 81

*(istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (An-Nisa':21)*⁵⁷

Adapun hikmah pensyari'atan mahar menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu motivasi dan tanggungjawab moral bagi setiap laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan.
2. Sebagai suatu kebebasan dari larangan hukum yang mutlak, kepada yang dibenarkan di dalam pergaulan.
3. Sebagai suatu bukti balasan penyerahan diri terhadap suami dari istri, sehingga terwujudnya rasa kebersamaan dengan pengertian yang sangat luas.
4. Terjalinnya hubungan dengan kasih sayang yang pantas dikenang oleh kedua belah pihak.
5. Sebagai penetapan status atau martabat wanita yang sudah dijunjung tinggi.

Dengan demikian, hikmah diwajibkan mahar atas suami adalah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Secara khusus, ini memiliki makna yang jauh, di mana secara umum suamilah yang lebih mampu untuk bekerja dan memberi nafkah. Dalam hal ini terkadang merupakan isyarat kepada sesuatu yang diharuskan atas suami, yaitu berupa memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Jadi suami harus sudah merasakan bertanggung jawab sejak awal. Disamping itu, mahar juga mengandung suatu penghormatan

⁵⁷ *Op.cit.*

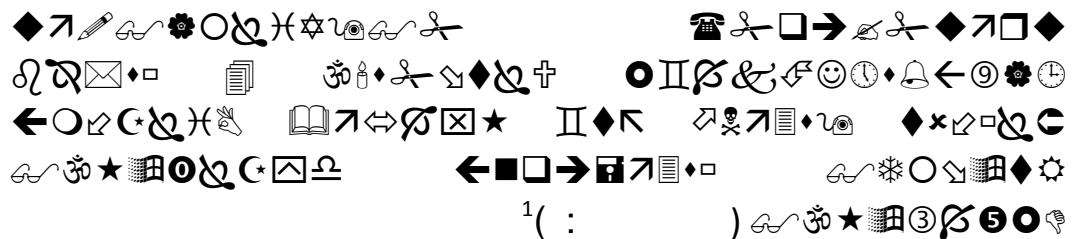
kepada wanita yang berada di bawah perlindungannya atau pimpinannya serta taat kepadanya sebagai kepala rumah tangga.

BAB IV

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MAHAR SUAMI MENINGGAL *QABLA AL-DUKHUL*

A. Pendapat Imam Malik Tentang Mahar yang Tidak Disebutkan Dalam Akad dan Suami Meninggal *Qabla al-Dukhul*

Mahar dalam pernikahan adalah suatu kewajiban terhadap calon suami, dan ini telah menjadi kesepakatan atau *ijma'* para ulama. *Ijma'* ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 4 :



Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan². kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa : 4).*

Dalam kitab *al-Ma'unah* disebutkan, tidak boleh menikah tanpa mahar, karena firman Allah SWT:

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muaqtashid*, (Darul-Fikr, *tth.*), jilid 2, h. 14

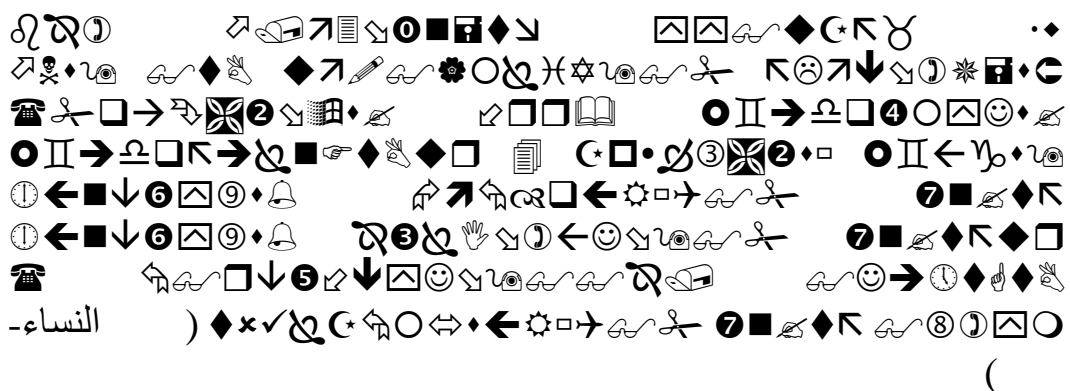
² Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.



Artinya: "... dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu ..."

"...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban..." (An-Nisa', ayat 24).

Kemudian para ulama juga sepakat, bahwa bagi perempuan yang di thalak sedangkan jumlah maharnya belum ditentukan dan belum pernah digauli, maka baginya hanya berhak memperoleh *mutah*⁴ saja. Kesepakatan ini di dasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 236:



Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),

³ Abi Muhammad 'Abdul Wahab ibn Nasir, *al-Ma'unah 'Ala Mazhab 'Alimilmadinah*, (beirut-libanon: Dar al-Fikr, *tth.*), Jilid 1, h. 498

⁴ *Mut'ah* yaitu: Harta yang diserahkan oleh suami kepada istri yang diceraikannya selain maskawin, untuk menghibur nya, dan sebagai ganti dari pedihnya perceraian.

*yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Surat Al-Baqarah: 236)*⁵

Pada ayat 236 surat *al-Baqarah* dinyatakan bahwa suatu pernikahan yang berlangsung tanpa menyebutkan atau menetapkan terlebih dahulu jumlah maharnya, maka pernikahan itu hukumnya sah. Dalam pembahasan kitab fiqh, pernikahan yang demikian disebut dengan nikah *tafwidh* yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa menyebutkan atau menetapkan terlebih dahulu mahar pada waktu akad nikah⁶.

Mengenai kebolehan melaksanakan nikah *tafwidh*, para ulama telah sepakat bahwa hukumnya *jaiz* (boleh)⁷. Hal ini didasarkan kepada ayat tersebut di atas. Dalam ayat itu diterangkan bahwa, tidak berdosa apabila suami menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya tersebut. Bila seseorang laki-laki melangsungkan pernikahan dengan mensyaratkan akad nikahnya tanpa pemberian mahar sama sekali, Imam Malik berpendapat perkawinan itu tidak sah hukumnya atau bahkan batal nikahnya⁸.

Selanjutnya, mengenai persoalan mahar yang belum ditetapkan oleh suami ketika akad nikah berlangsung dan ternyata kemudian suami meninggal dunia sebelum sempat menggauli istrinya, merupakan suatu masalah yang

⁶ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamiy Wa 'Adillatuhu*, (Damsyiq-Suriah: Dar At-Fikr, *tth*), Cet. ke-4, Juz ke-9, h. 241.

⁷ *Ibid.*, h. 256.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fathu al-I'lami al-arabi, *tth*), Juz ke-2, h. 107

diperselisihkan atau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha'. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu kitab fiqh yaitu *Kifayatul Akhyar* yang menyatakan sebagai berikut:

بِإِذَا
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 ٩

Artinya: *Jika salah seorang suami istri meninggal dunia sebelum menetapkan mahar dan belum pula berhubungan suami istri (watha') maka adalah kewajiban atasnya mahar mitsil atau tidak wajib sesuatu apapun, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.*

Dalam masalah ini, Imam Malik berpendapat bahwa mahar istri yang belum ditetapkan terlebih dahulu ketika berlangsungnya akad nikah, sementara suami kemudian meninggal dunia sebelum melakukan *dukhul*, maka bagi istri tidak mempunyai hak untuk memperoleh mahar dari suaminya yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagaimana yang termaktub di dalam atsar shahabat:

١ ٢ ٣ ٤ ٥
 ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
 ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥

⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Dar Al-Ihya, 1989), h. 62.

نَدِيَّةُ

عَ

عَ

¹⁰(). نَدِيَّةُ عَ عَ

Artinya: *Bersumber dari Malik dan Nafi, bahwasanya anak dari Abdullah bin Umar dan anak Zaid Ibn Khattab. Adalah ia menikah dengan anak laki-laki Abdullah Ibnu Umar, maka ia meninggal dunia dan belum bercampur dengannya dan tidak pula menyebutkan mahar baginya. Maka menuntutlah ibunya terhadap maharnya, maka berkatalah Abdullah ibn Umar, jika adalah baginya mahar, tidaklah kami menahannya, dan tidak pula menzaliminya. Maka bersikeraslah ibunya menuntut mahar tersebut. Kemudian disampaikanlah hal tersebut kepada Zaid bin Tsabit, maka ia memutuskan dengan tidak ada mahar bagi isteri, dan baginya hanyalah harta warisan. (Diriwayatkan oleh Imam Malik).*

Qaul al-Sahabah atau *ijtihad* Zaid bin Tsabit pada masalah ini dijadikan pegangan oleh Imam Malik dalam memperkuat pendapatnya. Terhadap *atsar* di atas, Muhammad al-Zarqany menjelaskan dalam kitabnya *Syarah al-Zarqaniy 'ala al-Muwattha'*, bahwa pendapat tersebut di pegang oleh 'Ali dan jumhur sahabat¹¹.

Pendapat Imam Malik ini yang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Daud, dan pendapat *rajih* Imam Syafi'e, yang mengatakan bahwa mahar *mitsil* wajib pada pernikahan *tafwidh*, dan suami telah menggauli isterinya, atau suami meninggal sebelum sempat menggauli isterinya¹².

¹⁰ Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwattha'*, (Dar al-Gharbi al-Islmiy, tt.), Juz ke-2, h. 29.

¹¹ Muhammad Zarqani, *Syarah Al-Zarqaniy 'ala Al-Muwattha'*, (al-Khairiyyah, tth.), Jilid ke-3, h. 7-8

¹² Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 107

Menurut Abu Daud dan Tirmidzi bahwa hadits yang dipakai sebagai dasar pendapat ini kedudukannya adalah *hasan shahih* di mana dalam hadits dari Ma'qil bin Yasar itu diceritakan tentang kasus bahwa Barwa' binti Wasyiq yang melaksanakan pernikahan tanpa menetapkan mahar terlebih dahulu kemudian suaminya meninggal sebelum menyentuhnya serta tidak meninggalkan mahar untuknya. Lalu Rasulullah SAW. menetapkan kepadanya bagian warisan dari harta peninggalan suaminya.

Selanjutnya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Madawwanah al-Kubra* yang menyatakan:

() (أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ مَرْأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا) :
جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَيَفْرِضُ لَهَا صَدَقٌ مِثْلُهَا نَ دَخَلَ بِهَا وَنَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَرَاضِيََا
فَلَهَا الْمُتْعَةُ نَ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَرَاضِيََا عَلَى صَدَاقٍ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا
وَلَا صَدَاقٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ.¹³

Artinya: (Aku katakan) engkau lihat jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia tidak menetapkan mahar baginya, (ia menyatakan) nikah tersebut boleh menurut Imam Malik dan ditetapkan bagi perempuan tersebut mahar mitsil, jika ia (suami) meninggal dunia sebelum menetapkan mahar kepada istrinya, maka istri tidak berhak memperoleh mut'ah dan mahar, tetapi ia berhak menerima bagian warisan (dari harta suami yang meninggal tersebut).

Dari keterangan di atas dapat dipahami, bahwa menurut Imam Malik, suatu pernikahan yang tidak disebutkan atau tidak ditetapkan lebih dahulu jumlah

¹³ Ibnu Rusyd, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth), Jilid ke-2, h. 164.

maharnya dalam akad nikah, maka tidak diwajibkan kepada suami untuk memberikan mahar *mitsil* kecuali karena terjadinya *dukhul* antara suami istri tersebut. Sedangkan bila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul* serta belum menentukan mahar ketika akad nikah dilangsungkan, maka gugurlah kewajiban kepada pihak suami dan keluarganya (wali) yang meninggal itu untuk membayar mahar kepada istrinya, baik berupa mahar *mitsil* ataupun *mut'ah*, kecuali hanya harta warisan saja yang berhak diterima istri¹⁴.

Hal di atas adalah pendapat Imam Malik dalam satu versi dan dapat dikatakan sebagai pendapat klasik atau *qaul qadim*, sebagaimana banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki. Namun, dalam versi lain Imam Malik juga berpendapat bahwa dalam persoalan istri yang ditinggal mati suaminya sebelum sempat digauli dan belum ditetapkan mahar pada waktu akad nikah, isteri berhak memperoleh *mut'ah* dan warisan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh ulama kontemporer yang mengangkat dan memahami pendapat Imam Malik atau bisa juga disebut *qaul jadid* (pendapat yang terbaru), sebagaimana yang tertera di bawah ini:

د

4

١٦٦

15.

م

 ϕ

•

¹⁴ *Ibid.*, h. 164.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, h. 20.

Artinya: *Apabila suami meninggal dunia sebelum menetapkan mahar dan belum pula berhubungan (dukhul) dengan istrinya, maka Imam Malik beserta sahabatnya (pengikutnya) dan Al-Auzaiy menetapkan tidak ada mahar bagi istri kecuali mut'ah dan harta warisan.*

Dalam keterangan di atas dapat dipahami, bahwa Imam Malik memang meniadakan kewajiban membayar mahar dalam kasus istri yang ditinggal mati suami sebelum sempat digauli dan belum ditetapkan maharnya ketika akad nikah. Istri hanya berhak memperoleh *mut'ah* dan warisan saja. *Mut'ah* yang dimaksudkan di sini ialah memberikan harta sesuai dengan kesanggupan pihak suami, ini bisa juga dikatakan sebagai pengganti mahar (karena nikah *tafwidh*) dengan harapan isteri bisa terhibur dengan sebab pedihnya perceraian¹⁶.

Jadi, dalam menetapkan pendapatnya terhadap persoalan tidak berhaknyanya istri memperoleh mahar dari suaminya yang belum ditetapkan dalam akad nikah, dan kemudian suami meninggal sebelum menggauli istrinya, Imam Malik menggunakan dalil-dalil di antaranya adalah:

1. *Qaul Shahaby*

Karena permasalahan ini tidak diperdapatkan dalam nas baik al-Qur'an maupun dalam *sunnah*, begitu juga tidak ada *ijma'* dan amal ahli madinah, maka Imam Malik dalam menetapkan pendapatnya berpegang kepada dalil lainnya yaitu *qaul shahaby* yang di dalamnya menerangkan tentang pernikahan putri Ubaidullah yang menikah dengan putra Abdullah Ibn Umar yang kemudian

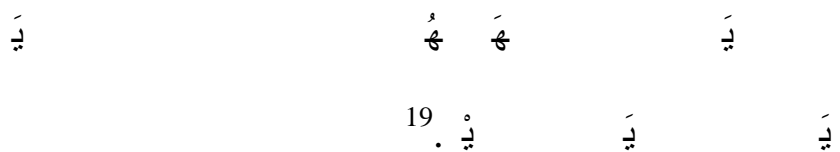
¹⁶ Wahbah Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 299

meninggal dunia sebelum bercampur dengan istrinya dan tidak pula menyebutkan mahar untuk istrinya pada waktu akad nikah. Lalu ibu pada istri tersebut menuntut kepada pihak suami anaknya untuk menunaikan maharnya, hingga terjadi percekocan dan pada akhirnya diputuskan oleh Zaid bin Tsabit, bahwa tidak ada pemberian mahar kepada wanita yang ditinggal mati suaminya itu. Bagi istri tersebut hanya berhak memperoleh warisan dari harta peninggalan suaminya¹⁷.

Disisi lain juga terdapat *qaul shahabat* seperti yang diriwayatkan Ibn Mas'ud, yang mengatakan bahwa isteri berhak mahar *mitsil*. Namun, riwayat ini dianggap *syaz* (cacat) oleh Imam Malik, sehingga beliau mengatakan bahwa pendapat tersebut tidak boleh di 'amalkan¹⁸.

2. *Qiyas*

Disamping *qaul shahabat* diatas, Imam Malik ibn Anas dalam menetapkan pendapatnya juga berpegang kepada dalil *qiyas*. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya sebagai berikut:



Artinya: Adapun *qiyas* yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu mahar tersebut adalah sebagai ganti (penukar), maka selama benda yang akan diganti

¹⁷ *Ibid.*, h. 23.

¹⁸ Zarqani, *op.cit.*, h. 8

¹⁹ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 21.

tersebut tidak diambil, tidak pula diwajibkan memberi gantinya sebagaimana diqiyaskan kepada jual beli.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa Imam Malik menguatkan pendapatnya dengan mengqiyaskan hal tersebut kepada jual beli. Karena jual beli itu pada hakikatnya adalah tukar menukar sesuatu atau benda, jika benda atau sesuatu tersebut tidak diambil oleh pembeli, maka penukarannya pun tidak mesti diberikan. Begitu pula halnya dengan mahar, dimana bila suami belum sempat menggauli isterinya, maka suami tidak perlu memberikan *'iwadh* atau pengganti.

Namun demikian, penqiyasan mahar pada masalah tersebut di atas tidak dapat diterapkan kepada masalah-masalah lain dalam artian terbatas pada masalah mahar istri yang belum ditetapkan oleh suami yang meninggal dunia *qobla al-dukhul*. Karena mengenai masalah ini tidak dijumpai penjelasan yang *qath'i* dalam nash serta berbedanya situasi dan kondisi berikut pemahamannya yang timbul²⁰.

B. Pendapat Mayoritas *Fuqaha'* Tentang Mahar yang Tidak Disebutkan dalam Akad dan Suami Meninggal *Qabla Al-Dukhul*

Menurut pendapat mayoritas *fuqaha'*, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Daud dan fatwa Imam Syafi'i yang paling *rajih* (kuat) mengatakan bahwa, bila suami meninggal sementara ia belum sempat melakukan hubungan suami istri dengan perempuan yang dinikahnya dan suami

²⁰ Muhammad Zarqani, *op.cit.*, h. 22.

pun belum menetapkan jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istrinya ketika 'aqad berlangsung, maka istri berhak memperoleh mahar *mitsil* (mahar yang diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan disamakan dengan perempuan lainnya, baik dari segi umur, kecantikan, harta, kepribadian, agama, perawan atau janda dan daerah asalnya ketika 'aqad nikah berlangsung) dan juga warisan²¹.

Jadi, bagi istri yang ditinggal mati oleh suami yang belum sempat bercampur dengannya dan tidak ditetapkan mahar sebelumnya, maka ia berhak mendapatkan mahar seperti perempuan lain yang dinikahi pada umurnya, dengan jumlah yang tidak kurang dan tidak lebih. Baginya juga terkena kewajiban menjalankan 'iddah (masa menunggu) dan berhak pula menerima warisan. Menurut mereka pendapat ini sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Rasulullah SAW dalam kasus Barwa' binti Wasyiq yang dinikahi oleh suaminya, namun kemudian suami meninggal dunia sebelum sempat menggaulinya sementara mahar belum ditetapkan sebelum 'aqad nikah²².

Para *fuqaha'* dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa apabila suami telah menggauli istrinya atau berkhawat (berduaan) dengannya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka bagi istri berhak menerima mahar yang disebutkan atau mahar *mitsil* sesuai dengan cara yang telah dikemukakan. Setelah itu mahar itu

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Moh. Thalib), Jilid 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Cet 12, h. 52.

²² *Ibid.*, h. 65.

Ibnu Abu Laila, Imam Abu Hanifah berikut seluruh sahabatnya yaitu Ishaq dan Imam Ahmad bin Hanbal²⁴.

Silang pendapat antara Imam Malik dan *jumhur* disebabkan oleh adanya pertentangan antara *qiyas* dengan *atsar*. *Atsar* tersebut adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud r.a ketika ditanya tentang persoalan mahar yang tidak disebutkan dalam akad, dan suami meninggal *qabla al-dukhul*, ia menegaskan bahwa istri memperoleh maskawin seperti maskawin wanita dari golongannya (mahar mitsil), tanpa pengurangan atau kelebihan, dan isteri tersebut juga harus beriddah dan berhak mendapat warisan. Masalah ini juga telah beri kesaksian oleh Ma'qal bin Yasar dengan mengatakan bahwa Ibn Mas'ud telah menghukum dengan keputusan Rasulullah SAW. terhadap Barwa' binti Wasyiq.

Segi pertentangan *qiyas* dengan *atsar* itu ialah karena Imam Malik memahami maskawin itu sebagai pengganti. Jadi, selama suami belum menggauli isterinya, maka pengganti tersebut (mas kawin) tidak diwajibkan karena diqiyaskan kepada jual beli²⁵.

C. Analisa Penulis

Pendapat Imam Malik yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama dalam menetapkan status hukum mahar tersebut tidak bisa kita katakan lebih benar dari pendapat Imam-Imam yang lain, begitu juga sebaliknya. Karena semua pendapat

²⁴ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 617.

²⁵ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 20.

para mujtahid itu disertai dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yang mereka pilih serta digunakan untuk menguatkan masing-masing pendapatnya. Hanya saja bagaimana bagi generasi-generasi berikutnya memilih dan menetapkan salah satu pendapat yang dianggap sesuai untuk masa sekarang bila kasus-kasus serupa ini terjadi dalam masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Imam Malik mengatakan bahwa mahar tersebut menjadi gugur seluruhnya karena sebab kematian suami dan karena sebab belum digaulinya istri oleh suami yang meninggal dunia itu²⁶. Menurut pendapat beliau pernikahan yang belum ditetapkan maharnya itu diqiyaskan dengan jual beli, di mana setelah barang atau sesuatu yang mau dibeli itu diambil, maka ketika itu pulalah penukaran atau gantinya harus diberikan. Berkaitan dengan persoalan di atas yaitu sebab mahar tidak ditetapkan dan sebab istri belum digauli, maka hukum pembayaran mahar tersebut pun ditiadakan²⁷.

Dalam hal ini konsekuensi hukumnya adalah kewajiban membayar mahar terhadap istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu menjadi gugur dikarenakan jumlah maharnya belum ditentukan sementara suami meninggal dunia sebelum menggauli istrinya. Jadi konsekuensi yang harus dipenuhi dalam masalah ini, menurut Imam Malik adalah pihak suami (walinya) hanya harus membayar *mut'ah* dan memberikan bagian warisan kepada istri²⁸.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Mudawwanah Al-Kubra*, *Op.Cit.*, h. 164.

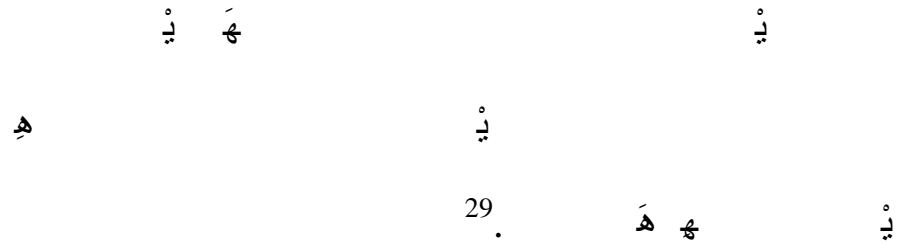
²⁷ *Ibid.*, h. 165.

²⁸ *Ibid.*, h. 166.

Dalam masalah ini Imam Malik mendasari pendapatnya pada *qaul shahabat* dan *qias*. Disini dapat dilihat dengan jelas bahwa para fuqaha' tidak ada satupun yang menggunakan dalil nas Al-Quran, karena tidak ada ayat yang menjelaskannya. Adapun Surat al-Baqarah ayat 236 tidak dapat dijadikan dalil karena masalahnya sudah berbeda, yaitu mahar istri yang belum ditetapkan oleh suami dalam 'aqad nikah dan bercerai (bukan ditinggal mati) *qabla al-dukhul*.

Dalam penetapan hukum ini, selain *qaul shahabat* yang digunakan, Imam Malik juga menggunakan *qiyas*, dimana beliau menganalogikan mahar ini kepada 'iwadh pada jual beli, dan disini terjadi perbedaan pemahaman dengan mayoritas ulama lain, karena mayoritas ulama tidak melihat atau menganggap mahar ini sebagai pengganti atau 'iwadh. Jadi, perbedaan disini terjadi karena perbedaan pemikiran dan cara pandang dalam suatu persoalan. Sehingga konsekuensinya adalah apabila suami belum menyentuh atau menggauli isterinya maka suami juga tidak perlu memberikan pengganti yaitu berupa mahar.

Kemudian perbuatan penduduk Madinah tidaklah terlepas dari perkataan dan ijtihad para sahabat, dengan demikian *asar* yang telah menetapkan bahwa tidak ada mahar bagi suami yang meninggal dunia *qabla al-dukhul* dan maharnya belum ditetapkan, yaitu seperti ijtihad Zaid bin Tsabit di atas adalah dasar hukum di antara dasar hukum yang dapat diterima dan dijadikan hujjah. Bahkan dikatakan dalam kitab *Ushul Fiqh Al-Islam* bahwa:



Artinya: Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkataan sahabat adalah ijihad yang tidak dapat dikalahkan oleh sahabat yang lain, karena sahabat tersebut berbeda pendapat dalam banyak permasalahan. Jika perkataan seorang mereka menjadi hujjah bagi yang lain niscaya tidak terjadi perbedaan pendapat ini.

Dengan demikian, tentu saja pendapat Imam Malik tidak terlepas dari sisi kelebihan, dan sisi kekurangan atau kelemahannya. Diantara kelebihanannya adalah dapat memperingankan beban pihak keluarga suami dari tanggungan dan kewajiban dalam menunaikan mahar. Sementara sisi kelemahannya yaitu mengurangi rasa tanggung jawab terhadap kewajiban memberi mahar, sehingga keadaan wanita dalam perkawinan seakan-akan kurang terhormat.

Setelah melihat uraian diatas tentang pendapat Imam Malik, penulis merasa cenderung kepada pendapat jumhur ulama, yang mengatakan bahwa mahar isteri yang ditinggal mati suami sebelum *dukhul* dan dalam akad tidak ditentukan maharnya, tetap berhak menerima mahar *mitsil*. Disini penulis beralasan kepadahal-hal sebagai berikut:

Pertama, hadist yang diriwayatkan Ibn Mas'ud, dimana hadist tersebut tertulis sebagai hadist shahih dalam *sunan At-Turmizi*, dan dalam riwayat yang lain hadist tersebut adalah di ambil dari Hasan ibn Ali al-Khallal, dan di ambil

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islam*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), Cet. 1, juz-ke 2, h. 851.

dari Yazid ibn Harun dan Abdul al-Razzaq, keduanya mengambil dari Sufyan dan Sufyan mengambil dari Mansur, dengan matan yang sama seperti yang di riwayat oleh Ibn Mas'ud, dan menganggap hadist ini sebagai hadist *hasan shahih*³⁰. Jadi, posisi hadist ini masih sangat kuat untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam masalah mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan suami meninggal *qabla al-dukhul*.

Kedua, memandang kepada maksud utama dari nikah adalah *istimta'* atau bersenang-senang dengan isteri, dan juga untuk menjaga keturunan dan lain-lain. Jadi bukan mahar yang menjadi tujuan, sehingga tidak perlu di qiyaskan kepada jual beli, dimana dalam jual beli salah satu maksudnya adalah harga. Dengan alasan ini pula kita memahami bahwa mahar itu tidak wajib disebutkan dalam akad nikah, seperti dalam perkawinan *tafwidh*³¹.

Namun demikian, pendapat yang telah dikemukakan oleh Imam Malik bukanlah sembarangan pendapat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa beliau adalah seorang ahli hadist, dan ahli fiqh pada masanya. Disamping itu beliau juga terkenal dengan kehati-hatiannya dalam mengambil hadist dan memberi fatwa tentang suatu perkara.

³⁰ Muhammad ibnn Isa ibn Surah at-Turmizi, *Sunan At-Turmizi*, (Riyadh, *tth.*), Cet. 1, h. 271

³¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Op.Cit.*, h. 61

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Malik, mahar hukumnya wajib ditunaikan oleh suami terhadap isteri. Kecuali dalam pernikahan yang tidak menyebutkan mahar (*tafwidh*) dan suami meninggal *qabla al-dukhul*, karena tidak ada penjelasan yang jelas dari al-Quran dan hadits, sehingga Imam Malik mengkiyaskan masalah ini kepada harga yang ada dalam jual beli.
2. *Jumhur fuqaha'* berpendapat bahwa pihak suami wajib memberikan mahar *mitsil* kepada isteri dalam kasus pernikahan yang tidak menetapkan mahar dalam akad nikah (perkawinan *tafwidh*), sementara kemudian suami meninggal dunia sebelum sempat menggauli isterinya. Ini di sandarkan kepada atsar dari Ibnu Mas'ud dalam kasus Barwa' binti Wasyiq.
3. Setelah menganalisa pendapat dari kedua belah pihak, penulis memandang kuat pendapat yang dikemukakan oleh *jumhur fuqaha'*, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa mahar isteri yang meninggal suaminya sebelum *dukhul* dan dalam akad nikah tidak ditentukan maharnya, pihak suami wajib memberikan mahar *mitsil*.

B. Saran

Setelah penulis membuat beberapa kesimpulan pada skripsi ini, maka sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memungkinkan penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Persoalan mahar yang tidak disebutkan dalam akad dan suami meninggal sebelum sempat menggauli isteri (*dukhul*) adalah persoalan khilafiyah, maka untuk menghilangkan keragu-raguan hendaknya kita mengambil pendapat yang kita anggap lebih kuat dalam persoalan tersebut.
2. Dalam mengistinbathkan hukum tentang suatu permasalahan dibuthkan ilmu yang memadai, kehati-hatian dan ketelitian sehingga hukum tersebut sesuai dengan cita-cita syari'at dan tidak jauh melenceng dari maksud syar'i.
3. Penelitian yang berkaitan dengan mahar suami meninggal *qabla al-dukhul* sebagaimana dilakukan penyusun, dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Imam Malik, studi ini juga belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abi, bin, Muhammad, Syamsuddin, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1938), Juz 6
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 2007), Cet. Ke-5
- Abu Isa Muhammad ibn Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, *th.*), Juz 2
- Al-Jaziri, Rahman , Abdul, *Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiyyah, *tth.*), juzu' 4
- Al-Qurdi, Al-Hajji, Ahmad, "*Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*" *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, (Terj. Moh. Zuhri. Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 1986)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islam*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), Cet. 1, juz-ke 2
- _____, *Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu*, (damsyiq-suriyah: Dar Al-Fikr, *tth.*), Juz 9
- Anas, ibn, Malik, 'Abdillah, Abu, *Al-Muwattha'*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, *tth.*), Juz ke-2
- An-Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy*, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Misriyah Wa Maktabuha, 1924), Juz 3
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Nailul Authar*, (Terj. Adib Bishriy Musthofa), (Semarang: Asy-Syifa', 1994), Jilid 6
- Asy-Syurbasi, Ahmad, Terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Pt.Bumi Aksara, 1991), Cet. 1
- At-Tirmidzi, Imam, *Jami' Tirmidzi*, (Riyadh: Darussalam Lin-Nasyr Wa-Tauzi', 1999)
- At-Tirmidzi, Surah, ibn, Muhammad, Isa, Abu, *Sunan At-Tirmidzi*, (Muhammad Jamil Al-A'thar), Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, *t.th.*), Juz 2
- Bakar, Abi, Taqiyuddin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Dar Al-Ihya, 1989)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989)
- Farid, Ahmad, Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham Lc., dan Asmu'i Taram Lc., (Pustaka Al-Qausar, 2007), Cet ke-2

Ghazali, Rahman, Abd, MA, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-2

Hasan, Hamid, Husain, *al-Madkhal Lidirasat al- Fiqh al-Islami*, (Mesir, ttp, 1981)

<http://uin-suka.info>

<http://www.taghrib.ir>

ibn Syata, ibn Muhammad, Sayid Bakri, *I'anatuththaalibin*, (Indonesia: Dar Al-Ihya) Jilid 1

Kauma, Fuad, *Perjalanan Spritual Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), Cet. Ke-3

Lathif, Abdul, ibn, Ahmad, *Annufahat 'ala syarhil waraqat*, (Surabaya, tth)

Nasir, ibn, Wahab, 'Abdul, Muhammad, Abi, *al-Ma'unah 'Ala Mazhab 'Alimilmadinah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tth), Jilid 1

Philip, Bilal, Ameenah, Abu, Terj. M. Fauzi Arifin, *Asal dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), Cet. 1

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muaqtashid*, (Darul-Fikr, tt), jilid 2

_____, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tth), Jilid ke-2

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Qahirah: Fathu l'lami al-Arabi, tth), Jilid ke-2

Sulaiman, Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, (Beirut-Lebanon: Dar asy-Sya'b, tth.)

Yanggo, Tahido, Huzaeman, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Legos, 1997)

zahrah, Abu Muhammad, Malik, *hayatuhu wa 'asruhu, ara-uhu wa fiqhuhu*, (Dar-Fikr al-arabi, tth.)

Zarqani, Muhammad, *Syarah Al-Zarqaniy 'ala Al-Muwattha'*, (al-Khairiyyah, tth.), Jilid ke-3